Andriani, S., & Nurul, F. (2022). *Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal oleh BPOM.* **Jurnal Hukum Kesehatan**, 5(1), hlm. 17.

ASEAN Cosmetic Committee. (2015). *ASEAN Cosmetic Directive (ACD)*, Lampiran I–II.

ASEAN Cosmetic Committee. (2021). *ASEAN Cosmetic Directive (ACD).*

Ayu Humaira & Yulia. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM (Studi di Kota Idi, Aceh Timur).* Skripsi. Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

Az. Nasution. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar.* Jakarta: Diadit Media.

Balai Besar POM di Gorontalo. (2023). *Laporan Kinerja Tahun 2023 (Lapkin 2023).* Diakses dari https://gorontalo.pom.go.id

Balai Besar POM di Gorontalo. (2024). *Laporan Kinerja Triwulan I–III Tahun 2024.* Diakses dari https://gorontalo.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).*

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Penarikan dan Pemusnahan Produk Kosmetika.*

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pengawasan Kosmetik.*

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2022). *Program Edukasi Publik tentang Kosmetik Aman.*

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2022). *Sistem e-Watch Cosmetic: Inovasi Pengawasan Produk Kosmetika Secara Digital.*

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2022). *Informasi Seputar Kosmetik.* Diakses dari www.pom.go.id

Black's Law Dictionary. (2019). *Definition of Caveat Venditor & Strict Liability* (11th ed.). Thomson Reuters.

Cut Desi Wanda Sari. (2020). *Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum di Kota Banda Aceh.* Skripsi. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Ferdiyansah, S.Si. (2025). Ketua Tim Pembina. *Wawancara oleh Penulis.* BPOM Gorontalo, 13 Oktober 2025.

Fitria Rahma Fitri Dai, dkk. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal.* **Jurnal Ilmu Hukum**, 5(2).

Frans Magnis Suseno. (1997). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.* Jakarta: Gramedia.

Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal.* **Jurnal Panorama Hukum**, 8(1), hlm. 18–19.

H.D. Stout dalam Philipus M. Hadjon. (1987). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Howells, Geraint & Weatherill, Stephen. (2005). *Consumer Protection Law.* Aldershot: Ashgate.

Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Hukum Tata Negara.* Jakarta: Konstitusi Press.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Penuntutan Kasus Obat dan Makanan Ilegal.*

Kementerian Kesehatan RI & BPOM RI. (2020). *Kerja Sama Pengendalian Risiko Kesehatan dari Bahan Kosmetika.*

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2022). *Laporan Tahunan Penanganan Konten Perdagangan Ilegal.*

Kementerian Perdagangan RI. (2021). *Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.*

Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.

Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective.* New York: Russell Sage Foundation.

Manullang. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nathasya, B. (2022). *Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Konsumen di Air Dingin Pekanbaru.* Skripsi.

Nota Kesepahaman BPOM–Polri. (2019). *Tentang Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan.*

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengawasan Kosmetika. Diakses melalui https://jdih.pom.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id/Details/74127/perpres-no-80-tahun-2017

Philipus M. Hadjon. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Philipus M. Hadjon. (2007). *Hukum Administrasi dan Wewenang Pemerintahan.* Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

POM RI. (2020). *Program Pengawasan Terpadu dengan Pemerintah Daerah.*

Prosser, William L. (1971). *Handbook of the Law of Torts* (4th ed.). West Publishing.

Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Sondang P. Siagian. (2002). *Filsafat Administrasi.* Jakarta: Bumi Aksara.

Twomey, David P. (2016). *Business Law: Principles for Today's Commercial Environment* (6th ed.). Cengage Learning.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.

World Health Organization. (2017). *International Harmonization of Regulatory Requirements for Cosmetics.* WHO Technical Report Series No. 1044.